**RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 64/PUU-XVIII/2020**

**“Perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Dalam Bentuk Izin Usaha Pertambangan
Khusus (IUPK)”**

I. PEMOHON

1. Dr. Drs. Helvis, S.Sos. S.H., M.H. (Pemohon I);
2. Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si (Pemohon II);

Selanjutnya disebut para Pemohon.

Kuasa Hukum:

Tezar Yudhistira, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juli 2020.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU MInerba).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Para Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 mengatur *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus*

pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945”;*
- Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. memutus pembubaran partai politik;*
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*
- Bahwa objek permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 169A UU Minerba, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan permohonan *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;*

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;*
 - d. lembaga negara.*
- 2. Bahwa Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, menguraikan tentang kapasitas para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
- 3. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia dan pembayar pajak, berprofesi sebagai Advokat serta Konsultan Hukum bersertifikat pada bidang Pertambangan;
- 4. Bahwa Pemohon I dirugikan dengan ketentuan Pasal 169A UU Minerba yang mengatur mekanisme pengkhususan bagi Badan-Badan Usaha Pertambangan yang masih berbentuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Hal tersebut mengakibatkan tidak dimungkinkannya Badan Usaha Pertambangan lain untuk mendapatkan kesempatan yang sama di wilayah yang sudah dimiliki oleh badan-badan usaha yang memiliki KK dan PKP2B sehingga

- berpotensi merugikan Pemohon I saat menjadi konsultan pertambangan di perusahaan tempatnya bekerja;
5. Bahwa Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia dan pembayar pajak, selaku Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan visi dan misi ISNU dalam mengawal peraturan perundang-undangan agar tidak merugikan kepentingan rakyat serta memiliki *concern* terhadap tata kelola pertambangan mineral dan batubara Indonesia;
 6. Bahwa Pemohon II dirugikan dengan ketentuan pasal *a quo* yang cenderung mengakomodir kepentingan sekelompok Badan Usaha untuk tetap mendapat jaminan penyesuaian sekaligus perpanjangan Izin Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah ditetapkan dalam KK dan PKP2B sehingga tidak sejalan dengan perjuangan Pemohon II dalam menjalankan visi dan misi ISNU;

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 169A

- (1) *KK dan PKP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:*
 - a. kontrak/perjanjian yang belum memperoleh perpanjangan dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.*
 - b. kontrak/perjanjian yang telah memperoleh perpanjangan pertama dijamin untuk diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama KK atau PKP2B dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.*
- (2) *Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:*

- a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/ atau;
 - b. luas wilayah IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang disetujui Menteri.
- (3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan PKP2B yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan Pertambangan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk komoditas tambang Batubara wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk komoditas tambang Batubara yang telah melaksanakan kewajiban Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara secara terintegrasi di dalam negeri sesuai rencana pengembangan seluruh wilayah perjanjian yang disetujui Menteri diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 18A ayat (2)

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

2. Pasal 27

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

3. Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

(2) *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”,*

(3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020, Pemerintah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara (RUU Minerba) menjadi Undang-Undang (UU) dan pada tanggal 10 Juni 2020 telah ditetapkan dan diundangkan RUU tersebut menjadi UU Minerba, yang memiliki kecacatan secara substansi (materiil);

2. Bahwa menurut para Pemohon, UU Minerba bermasalah secara materiil karena kehilangan “ruh” idologi politik ekonomi (prinsip demokrasi ekonomi) yang berbasis pada ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang mana negara pada akhirnya kehilangan peran dan kedaulatannya;
3. Bahwa ketentuan Pasal 169A UU Minerba berimplikasi terhadap beberapa hal yaitu:
 - a. Pemegang KK dan PKP2B yang akan berakhir kontrak/perjanjiannya dapat secara langsung (otomatis) diperpanjang dengan jaminan mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK (2x10 tahun);
 - b. Pemegang KK dan PKP2B yang memperoleh perpanjangan melalui IUPK langsung memperoleh luas wilayah yang eksisting berdasarkan kontrak yang terdahulu;
 - c. Pemegang KK dan PKP2B selain memperoleh luas wilayah yang eksisting dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK untuk tahap kegiatan Operasi Produksi kepada Menteri (potensi perluasan wilayah);
 - d. Pemegang KK dan PKP2B diperlakukan berbeda dengan Badan Usaha swasta sebagai akibat dari tidak tunduknya Pemegang KK dan PKP2B terhadap ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU Minerba yang harusnya mengikuti lelang bersama Badan Usaha swasta lainnya jika ingin memperoleh IUPK;
 - e. Negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kehilangan peluangnya untuk mengambil alih kepemilikan pertambangan yang ditinggalkan oleh pemegang KK dan PKP2B sebagai akibat dari berakhirnya kontrak/perjanjian;
 - f. Rumusan pasal *a quo* memberikan peran yang terlalu besar kepada Menteri dan menegasikan peran Pemerintah Daerah.
4. Bahwa implikasi dari ketentuan pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 27 UUD 1945 karena adanya perbedaan perlakuan antara

pemegang KK dan PKP2B dengan Badan Usaha swasta untuk memperoleh IUPK. Padahal pemegang KK dan PKP2B juga merupakan Badan Usaha swasta yang sama posisinya dengan Badan Usaha swasta yang diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU Minerba;

5. Bahwa penambahan pasal *a quo* dalam UU Minerba tidak memiliki politik hukum yang jelas, dikarenakan tidak ada *ratio legis*/alasan hukum dari pembentuk undang-undang dalam mengubah undang-undang untuk mengatur hak-hak pemegang KK dan PKP2B yang mana 2 (dua) jenis kontrak tersebut adalah Badan Usaha swasta;
6. Bahwa beberapa perusahaan pemegang PKP2B yang masa kontraknya akan berakhir seperti PT. Kendilo Coal Indonesia, Kaltim Prima Coal/KPC, PT Multi Harapan Utama, PT. Arutmin Indonesia, PT. Adaro Indonesia, PT. Kedico Jaya Agung, dan PT. Berau Coal adalah pemasok utama batubara ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memenuhi kelistrikan nasional. Hal ini memperlihatkan PLN masih bergantung diri kepada perusahaan-perusahaan PKP2B sebagai pemasok batubara untuk aliran listrik nasional;
7. Bahwa besarnya keterkaitan batubara sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik nasional pada PLN memperlihatkan bahwa batubara adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga telah sewajarnya pemegang PKP2B dapat di alihkan ke BUMN/BUMD agar negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya batubara (penguasaan negara);
8. Bahwa pasal *a quo* memperlihatkan ketidakberpihakan pembentuk undang-undang terhadap peran (organ negara) melalui BUMN dan BUMD yang memperoleh prioritas dalam mendapatkan IUPK tetapi pihak yang memegang KK dan PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian tanpa mengikuti pelbagai mekanisme yang diatur dalam Pasal 75 UU Minerba;
9. Bahwa Konstuksi Pasal 75 ayat (3) UU Minerba yang memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD untuk memperoleh IUPK sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang

sehingga ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

10. Bahwa keberadaan pasal *a quo* telah memberikan kewenangan yang terlampau luas kepada Menteri untuk memberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK kepada pemegang KK dan PKP2B tanpa mengikutsertakan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang secara langsung berdampak dari keberadaan kegiatan yang tertuang dalam KK dan PKP2B sehingga ketentuan pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).